



(Belum Disetujui oleh User Direksi)

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN (RAKB) TAHUN 2026



PT. BPR. WIRANADI

Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
1. Ringkasan Eksekutif	<i>1</i>
2. Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	<i>13</i>
3. Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	<i>15</i>
4. Prioritas dan Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	<i>23</i>
5. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	<i>25</i>
Lembar Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	<i>26</i>
Lampiran-lampiran	<i>27</i>

Kata Pengantar

Sebagai implementasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/ POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, BPR menyiapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026. Langkah ini merupakan wujud komitmen terhadap prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan operasional perbankan, sekaligus mendukung inisiatif Perbankan Hijau (*Green Banking*).

Penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah sebuah komitmen kolektif di industri jasa keuangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Implementasi ini krusial bagi keberlanjutan BPR, sebab pengabaian terhadap isu sosial dan lingkungan dapat memperbesar potensi risiko, khususnya risiko kredit yang disebabkan oleh peningkatan gagal bayar. Dengan demikian, pembiayaan yang berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap kestabilan finansial BPR WIRANADI dalam rentang waktu yang panjang.

Pada tahun 2025 ini, PT. BPR WIRANADI menyusun RAKB 2026 untuk ketiga kalinya dengan gambaran pencapaian penyaluran kredit yang masuk dalam Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) yaitu penyaluran kredit ke Sektor UMKM dengan pencapaian Rp. 48.675.000,00 pada tahun 2023, Rp. 52.674.984,00 tahun 2024 dan pada Triwulan III 2025 sebesar Rp. 54.748.849,00. Untuk kedepannya BPR WIRANADI akan terus menambah portofolio pembiayaan ke Sektor UMKM selaras dengan *core business* BPR yang memberikan pembiayaan kepada pengusaha Mikro dan Kecil.



Dalam pembiayaan ke sektor UMKM, BPR WIRANADI juga memastikan kredit yang diberikan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dengan melakukan analisis kredit dengan menilai dampak usaha terhadap lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan menghindari pemberian kredit pada usaha yang berpotensi merusak lingkungan. BPR WIRANADI memahami

pentingnya keuangan berkelanjutan dan menerapkan prinsip *triple bottom line* – *People, Planet, and Profit* – dalam operasionalnya, serta menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Memperhatikan urgensi implementasi Keuangan Berkelanjutan untuk BPR, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) ini krusial sebagai panduan bagi seluruh personel BPR dalam menjalankan Keuangan Berkelanjutan. Laporan RAKB ini adalah publikasi ketiga dari Bank terkait RAKB.

Guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan dengan bisnis yang solid dan sehat, BPR menyusun program prioritas dan detail RKAB Tahun 2026. Program ini akan dilaksanakan mulai tahun 2026 untuk periode 1 hingga 5 tahun mendatang (2026-2030), dengan menitikberatkan pada sektor UMKM. Hal ini selaras dengan visi dan misi Bank, serta memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam operasional bisnis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

BAB I.

Ringkasan Eksekutif

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1.1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Tahun 2026 merupakan tahap ketiga implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Dengan demikian disampaikan Jumlah produk dan nominal penyaluran dana yang memenuhi kriteria kegiatan usaha Berkelanjutan posisi Triwulan III 2025 per 30 September 2025 sesuai pada tabel di bawah ini:

Tabel Pencapaian Produk Keuangan Berkelanjutan

Nama Komponen	Posisi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025 (Triwulan 3)	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
a. Jumlah Produk Penghimpunan Dana Berkelanjutan	2	2	2	2
a.1. DPK	2	2	2	2
a.2. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
b. Outstanding Penghimpunan Dana Berkelanjutan (Rp)	110.785.668.665	125.553.867.886	126.234.575.787	130.546.476.765
b.1. DPK (Rp)	110.785.668.665	125.553.867.886	126.234.575.787	130.546.476.765
b.2. Surat Berharga (Rp)	-	-	-	-
c. Jumlah Penyaluran Dana Berkelanjutan	9.007.497.665	10.666.000.000	12.560.006.799	16.679.688.650
c.1. Kredit	9.007.497.665	10.666.000.000	12.560.006.799	16.679.688.650
c.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-
d. Outstanding Penyaluran Dana Berkelanjutan (Rp)	-	-	-	-
d.1. Kredit (Rp)	135.860.787.677	145.869.987.677	150.867.756.776	160.670.868.650
d.2. Surat Berharga yang dimiliki (Rp)	-	-	-	-
Total Kredit/Pembiayaan Bank Kepada Pihak Ketiga (Rp)	149.867.787.668	156.898.976.765	164.356.887.760	169.508.767.769
Persentase total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan bank (%)	90,60	92,90	91,46	94,67

Tabel Outstanding Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan

Nama Komponen	Baki Debet Posisi Tahun 2024	Baki Debet Tahun 2025 (Triwulan 3)	Target Baki Debet Tahun 2025	Target Baki Debet Tahun 2026
Total outstanding kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)	135.867.000.000	145.869.987.677	150.867.756.776	160.670.868.650
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	135.867.000.000	145.869.987.677	150.867.756.776	160.670.868.650

Tabel NPL Gross Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan

Nama Komponen	NPL Posisi Tahun 2024	NPL Tahun 2025 (Triwulan 3)	Target NPL Tahun 2025	Target NPL Tahun 2026
NPL Gross kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (%)	6,72	7,07	6,12	5,85
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-

f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	6,72	7,07	6,12	5,85

1.2. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Visi:

Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

Misi:

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat
2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup.



1.3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Mengacu pada POJK No. 51/ POJK.03/2017 tertanggal 27 Juli 2017 perihal Keuangan Berkelanjutan, BPR sebagai Lembaga Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan konsep keuangan berkelanjutan secara bertahap. Hal ini mencakup pengintegrasian delapan prinsip utama ke dalam kerangka organisasi, dengan fokus pada keseimbangan antara tiga aspek fundamental: Keuntungan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, dan Kelestarian Lingkungan.
2. Dalam implementasinya, BPR diwajibkan menyusun RAKB yang merupakan dokumen komprehensif menggambarkan rencana kegiatan usaha baik jangka pendek maupun panjang. Dokumen ini mencakup strategi konkret untuk merealisasikan program kerja dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang tepat.
3. Sesuai ketentuan, BPR harus menyusun Laporan Keberlanjutan yang secara menyeluruh mengungkapkan kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan dalam konteks praktik bisnis berkelanjutan.
4. Prosedur ini mengatur secara rinci mekanisme koordinasi antarunit dalam organisasi BPR, meliputi peran strategis Direksi, Bagian Bisnis, Sumber Daya Manusia, Unit Kepatuhan, dan Manajemen Risiko.
5. Untuk mendukung transformasi digital dan implementasi keuangan berkelanjutan, BPR membutuhkan Standar Pedoman Operasional yang komprehensif dan adaptif.



Target Net Zero Emission untuk Operasional	2.050
Target Net Zero Emission untuk Pembiayaan	2.050

Program Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan

1.4.1. Program Rencana Tahun Depan (Jangka Pendek)

No	Kategori, Jenis, dan Periode Pelaksanaan	Uraian Aktivitas	Target dan Tujuan	Indikator Pencapaian
1	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank) 01 Jan 2026 s/d 31 Des 2026	Mengurangi Penggunaan Kertas	Penghematan dan mendukung program go green	Penghematan penggunaan kertas sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2025 dan Peningkatan Utilitas e-office/ email.
2	Pengembangan Kapasitas Intern Bank (Program Pengembangan)	Mengadakan Sosialisasi, Training (inhouse/public course) atau workshop terkait Keuangan	Meningkatkan kompetensi pegawai tentang Keuangan Berkelanjutan	Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai dan / atau target training

	Pegawai) 06 Jan 2026 s/d 06 Jan 2026	Berkelanjutan (Sustainable Finance) kepada Internal Pegawai	(Sustainable Finance)	yang telah ditetapkan.
3	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank) 03 Feb 2026 s/d 03 Feb 2026	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup (Reminder)	Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar.
4	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank) 03 Mar 2026 s/d 03 Mar 2026	Pembuatan surat Edaran atau SK Diri tentang Penurunan Penggunaan Listrik (Kwh) dan penghematan air.	Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi	Penghematan biaya listrik dan air sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2025 dan perlunya pemasangan sticker- sticker tentang penghematan penggunaan listrik dan air pada beberapa sudut kantor sebagai upaya untuk meningkatkan awareness pegawai
5	Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan/ atau Standar Prosedur Operasional (Penyesuaian Organisasi) 02 Apr 2026 s/d 02 Apr 2026	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ditunjuknya Unit Kerja (Unit Bisnis) yang mengelola dan/atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan
6	Pengembangan Kapasitas Intern Bank (Program Pengembangan Pegawai) 01 Jun 2026 s/d 01 Jun 2026	Melakukan evaluasi dan update kebijakan tentang Keuangan berkelanjutan yang telah disusun.	Memiliki SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang update dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan.	Tersusunnya kebijakan sebagai dasar pedoman pelaksanaan Keuangan berkelanjutan (Disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisari)
7	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank)	Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan	Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan	Penurunan penggunaan air minum kemasan dan Penggunaan

	01 Agt 2026 s/d 31 Agt 2026		plastik yang sulit terurai.	Tumblr/gelas di setiap Rapat dan Pelatihan.
8	Pengembangan Produk dan/atau Jasa (Kredit) 01 Sep 2026 s/d 30 Sep 2026	Pilot Project Pembiayaan Sepeda Motor Listrik	Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan untuk mendukung program pemerintah menggeser Sepeda Motor Listrik berbahan bakar fosil ke Listrik.	Terdapat portofolio kredit minimal Rp. 150 juta untuk pembiayaan sepeda motor listrik
9	Pengembangan Produk dan/atau Jasa (Kredit) 01 Okt 2026 s/d 31 Okt 2026	Meningkatkan pertumbuhan kredit kepada usaha-usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) sebesar 1 (satu) % dari portofolio KYD UKM tahun sebelumnya.	Memberantas kemiskinan dan kelaparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.	Bertambahnya pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) yang Berwawasan Lingkungan.
10	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Eksternal Bank) 01 Nov 2026 s/d 30 Nov 2026	Pelaksanaan literasi keuangan dan akuisisi nasabah penyimpan dan debitur yang memiliki usaha masuk kategori berkelanjutan.	Terjalannya kerjasama yang efektif sehingga pemahaman mengenai Keuangan berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik.	Pelaksanaan literasi keuangan
11	Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan/ atau Standar Prosedur Operasional (Standar Prosedur Operasional) 01 Des 2026 s/d 31 Des 2026	Penyesuaian dan evaluasi kebijakan & prosedur di bidang Perkreditan	Mendukung program pemerintah untuk berkomitmen dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk dibuatkannya kebijakan.	Telah dilakukannya penyesuaian kebijakan & prosedur di bidang Perkreditan
12	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Eksternal Bank) 01 Des 2026 s/d 31 Des 2026	Mengakuisisi DPK (Dana Pihak Ketiga) dari nasabah yang sudah mendukung Program Keuangan Berkelanjutan.	Mendukung pendanaan berwawasan lingkungan	Terdapat DPK dari nasabah berwawasan lingkungan.

1.4.2. Program Rencana Lima Tahun (Jangka Panjang)

No	Tahun	Kategori, Jenis, dan Uraian Kegiatan	Target Kegiatan dan Indikator Keberhasilan
----	-------	--------------------------------------	--

1	2026	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank): Mengurangi Penggunaan Kertas	Penghematan dan mendukung program go green Penghematan penggunaan kertas sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2025 dan Peningkatan Utilitas e-office/ email.
2	2026	Pengembangan Kapasitas Intern Bank (Program Pengembangan Pegawai): Mengadakan Sosialisasi, Training (inhouse/public course) atau workshop terkait Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) kepada Internal Pegawai	Meningkatkan kompetensi pegawai tentang Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai dan / atau target training yang telah ditetapkan.
3	2026	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank): Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup (Reminder)	Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar.
4	2026	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank): Pembuatan surat Edaran atau SK Diri tentang Penurunan Penggunaan Listrik (Kwh) dan penghematan air.	Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi Penghematan biaya listrik dan air sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2025 dan perlunya pemasangan sticker- sticker tentang penghematan penggunaan listrik dan air pada beberapa sudut kantor sebagai upaya untuk meningkatkan awareness pegawai
5	2026	Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional (Penyesuaian Organisasi): Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan Ditunjuknya Unit Kerja (Unit Bisnis) yang mengelola dan/atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan
6	2026	Pengembangan Kapasitas Intern Bank (Program Pengembangan Pegawai): Melakukan evaluasi dan update kebijakan tentang Keuangan berkelanjutan yang telah disusun.	Memiliki SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang update dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan. Tersusunnya kebijakan sebagai dasar pedoman pelaksanaan Keuangan berkelanjutan (Disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris)
7	2026	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank): Penggunaan Wadah minuman yang	Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai.

		ramah lingkungan	Penurunan penggunaan air minum kemasan dan Penggunaan Tumbler/ gelas di setiap Rapat dan Pelatihan.
8	2026	Pengembangan Produk dan/atau Jasa (Kredit): Pilot Project Pembiayaan Sepeda Motor Listrik	Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan untuk mendukung program pemerintah menggeser Sepeda Motor Listrik berbahan bakar fosil ke Listrik. Terdapat portofolio kredit minimal Rp. 150 juta untuk pembiayaan sepeda motor listrik
9	2026	Pengembangan Produk dan/atau Jasa (Kredit): Meningkatkan pertumbuhan kredit kepada usaha-usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) sebesar 1 (satu) % dari portofolio KYD UKM tahun sebelumnya.	Memberantas kemiskinan dan kelaparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) yang Berwawasan Lingkungan.
10	2026	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Eksternal Bank): Pelaksanaan literasi keuangan dan akuisisi nasabah penyimpan dan debitur yang memiliki usaha masuk kategori berkelanjutan.	Terjalannya kerjasama yang efektif sehingga pemahaman mengenai Keuangan berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan literasi keuangan
11	2026	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Eksternal Bank): Mengakuisisi DPK (Dana Pihak Ketiga) dari nasabah yang sudah mendukung Program Keuangan Berkelanjutan.	Mendukung pendanaan berwawasan lingkungan Terdapat DPK dari nasabah berwawasan lingkungan.
12	2027	Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional (Standar Prosedur Operasional): Penyesuaian dan evaluasi kebijakan & prosedur di bidang Perkreditan	Mendukung program pemerintah untuk berkomitmen dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk dibuatkannya kebijakan. Telah dilakukannya penyesuaian kebijakan & prosedur di bidang Perkreditan
13	2028	Pengembangan Produk dan/atau Jasa (Kredit): Menambah Produk Keuangan Berkelanjutan	Melakukan kajian-kajian terkait permintaan pasar terhadap produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan Telah dilakukan kajian terkait produk pembiayaan usaha daur ulang kertas, plastik dan lainnya
14	2029	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Eksternal Bank):	Edukasi kepada debitur kategori kegiatan usaha berkelanjutan

		Pembelajaran terhadap Debitur	Edukasi kepada debitur terkait kategori kegiatan usaha berkelanjutan
15	2030	Pengembangan Produk dan/atau Jasa (Kredit): Pengembangan portofolio implementasi Keuangan Berkelanjutan	Jumlah kredit/pembiayaan Keuangan Berkelanjutan tumbuh 10% dari tahun awal implementasi. Jumlah kredit/pembiayaan Keuangan Berkelanjutan tumbuh 10% dari tahun awal implementasi.

Alokasi Sumber Daya, Penanggung Jawab, serta Mitra Kerja Sama

1.5. Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan

BPR akan mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Alokasi Sumber Dana	Rp375.000.000
Jumlah Dewan Komisaris	1 Orang
Jumlah Direksi	1 Orang
Jumlah Unit Kerja Utama	2 Orang
Jumlah Unit Kerja Terkait	2 Orang
Jumlah Lainnya	1 Orang

1.6. Seluruh Pihak yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan serta Mitra Kerja Sama

1. Unit Kerja RAKB menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap tahun termasuk bekerjasama dengan satuan kerja terkait khususnya dalam memproyeksikan rencana kegiatan yang masuk dalam kategori Keuangan Berkelanjutan.
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko memastikan penyusunan pedoman perusahaan dalam Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank, melakukan review dan memberikan rekomendasi terkait aspek Kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank. Selanjutnya melakukan monitoring Risiko Bank (Kredit dan Risiko Lainnya) terkait penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.
3. Satuan Kerja Personalia, Pendidikan dan Sekretariat melakukan pengembangan kapasitas intern pegawai terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan.
4. Seluruh karyawan menjadi penanggungjawab pelaksanaan program keuangan berkelanjutan.



Mitra Regulator:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki peran krusial sebagai pemberi arah dan pengawas implementasi keuangan berkelanjutan di BPR. OJK memberikan kerangka regulasi, pedoman teknis, serta melakukan supervisi berkala terhadap pelaksanaan program keuangan berkelanjutan, termasuk evaluasi laporan dan pemberian insentif regulasi bagi BPR yang berkomitmen pada praktik berkelanjutan. Bank Indonesia mendukung melalui kebijakan makroprudensial, penyediaan skema pembiayaan atau refinancing untuk produk berkelanjutan, serta edukasi manajemen risiko lingkungan dan sosial. Kolaborasi dengan regulator diwujudkan melalui konsultasi rutin, partisipasi dalam program pelatihan dan sosialisasi, pelaporan berkala sesuai format yang ditetapkan, serta koordinasi dalam pengembangan produk pembiayaan hijau yang sesuai dengan kapasitas dan karakteristik BPR.

Mitra Lembaga Lain:

Mitra lembaga lain mencakup lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan asosiasi yang memberikan dukungan operasional dan strategis. Bank umum, Bank Pembangunan Daerah, dan sesama BPR menjadi mitra dalam channeling pendanaan, joint financing, serta berbagi best practices implementasi keuangan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Bappeda berperan dalam verifikasi proyek ramah lingkungan, identifikasi calon debitur UMKM berkelanjutan, dan sinkronisasi dengan program pembangunan daerah. Perbarindo (Perhimpunan BPR Indonesia) dan asosiasi UMKM menjadi forum koordinasi antar BPR serta wadah identifikasi dan pembinaan calon debitur yang menjalankan usaha berkelanjutan. Kolaborasi ini memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan melalui sinergi

pendanaan, pembinaan, dan alignment dengan program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian target ESG BPR.

Mitra Konsultan/Fasilitator Eksternal:

Konsultan keuangan berkelanjutan, IT / Digital, dan HR berperan sebagai pendamping teknis dalam transformasi BPR menuju institusi keuangan berkelanjutan. Konsultan keuangan berkelanjutan melakukan assessment kondisi existing terhadap aspek ESG, menyusun roadmap dan action plan, mengembangkan framework penilaian risiko lingkungan dan sosial, serta memberikan pendampingan dalam penyusunan kebijakan, prosedur, dan sistem scoring pembiayaan berkelanjutan. Konsultan IT mengembangkan sistem informasi untuk tracking portfolio berkelanjutan, membangun dashboard monitoring ESG metrics, dan mengintegrasikan sistem pelaporan yang efisien. Konsultan HR merancang program pelatihan keuangan berkelanjutan untuk seluruh level organisasi, mengembangkan competency framework untuk sustainable finance officer, dan melakukan change management dalam proses transformasi. Keterlibatan para konsultan ini memastikan implementasi yang terstruktur, terukur, dan sesuai dengan standar internasional keuangan berkelanjutan.

Mitra Lainnya:

Mitra lainnya seperti universitas, NGO, perusahaan teknologi, lembaga sertifikasi, dan media memberikan dukungan strategis yang memperkaya implementasi keuangan berkelanjutan. Lembaga penelitian dan universitas menyediakan riset, kajian best practices, tenaga ahli sebagai advisor, serta program capacity building dan sertifikasi yang meningkatkan kredibilitas SDM BPR. NGO lingkungan dan lembaga pemberdayaan masyarakat berperan dalam verifikasi proyek ramah lingkungan, identifikasi calon debitur dari komunitas marginal, serta program pemberdayaan UMKM perempuan dan literasi keuangan. Perusahaan teknologi dan fintech menyediakan platform digital untuk akses pembiayaan, solusi payment yang efisien, dan integrasi data untuk assessment risiko ESG. Lembaga sertifikasi memberikan sertifikasi standar internasional (ISO 14001, dll) dan melakukan audit independen untuk meningkatkan kredibilitas eksternal. Media dan komunitas mendukung sosialisasi program, publikasi success stories, dan membangun brand awareness BPR sebagai BPR berkelanjutan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

BAB II.

Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

2.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan

Rujukan yang digunakan sebagai acuan BPR dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) adalah sebagai berikut:

- Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 - 2019.
- Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II di Indonesia 2021 - 2025.
- Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik tanggal 27 Juli 2017.



2.2. Keterlibatan Pihak Penyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam mengembangkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), BPR memilih untuk

tidak melibatkan pihak eksternal atau konsultan. Hal ini dilakukan oleh Bagian Bisnis dengan dukungan dari unit-unit kerja yang terkait dengan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan. Beberapa unit kerja yang terlibat antara lain:

- Pengembangan Produk dan Jasa keuangan berkelanjutan yang melibatkan Divisi Kredit dan Divisi Dana dan Jasa.
- Pengembangan Kapasitas Intern yang melibatkan Divisi SDM dan Divisi Umum.
- Penyesuaian organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Standar Operasional Prosedur melibatkan Divisi Corporate Secretary, Divisi TSI, Divisi SDM & Umum, Divisi Kepatuhan, Bagian Analis Kredit dan Bagian SKMR.



Keterlibatan Direksi	1 Orang
Keterlibatan Pejabat	2 Orang
Keterlibatan Konsultan	0 Orang
Keterlibatan Pihak Eksternal Lain	0 Orang

BAB III.

Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

3.1. Rencana Strategis Bank

Menyesuaikan dengan kondisi pasar pada saat ini BPR akan terus mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Surabaya pada umumnya selain dari kredit utama BPR yang pasarannya adalah pegawai negeri sipil daerah dan kontraktor, maka BPR juga akan membantu kredit UMKM sesuai dengan arah dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk menunjang hal tersebut BPR akan melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada para pegawai agar bisa menyesuaikan dengan arah kebijakan ekonomi dan dapat meminimalisir risiko yang akan tumbuh dikemudian hari.

Menyesuaikan dengan kebutuhan pasar maka Bank akan fokus pada peningkatan laba dan selalu memperhatikan RAKB sesuai dengan arahan OJK dengan cara :

1. Penyesuaian prosedur penyaluran kredit.
2. Membangun Desk Layanan Pelanggan dan Call Centre untuk merespon kebutuhan nasabah.



Sesuai dengan visi BPR untuk menjadi Bank berdaya saing tinggi dan kuat di Surabaya BPR mempunyai strategi sebagai berikut :

1. BPR akan melakukan ekspansi bisnis ke kabupaten-kabupaten di Jawa Timur.
2. Ikut serta dalam pemberian kredit sindikasi bersama mitra Bank daerah.

3. Memberikan fasilitas layanan prioritas kepada nasabah.
4. Pembuatan promosi audio maupun video.



3.2. Kapasitas Organisasi

A. Susunan Pengurus dan Pejabat Eksekutif

Dewan Komisaris Bank

No	Nama	Jabatan
1	SUHUD	Komisaris Utama
2	LA ODE RAHMAT	Komisaris

Direksi Bank

No	Nama	Jabatan
1	ABDUL LATIF	Direktur Utama
2	HARIYANTO	Direktur

Pejabat Eksekutif / Divisi / Unit / Satuan Kerja

No	Nama	Uraian Divisi / Unit / Satuan Kerja
1	Deni Dinauri	Kapala Bagian Operasional
2	Rizal Bustomi	PE Kepatuhan dan Manajemen Resiko
3	Aldo Dinoyo	PE Audit Intern
4	Suparmanto	Kepala Bagian Marketing

B. Jumlah Komposisi SDM (Sumber Daya Manusia)

Seiring persaingan yang semakin meningkat maka dibutuhkan tenaga- tenaga yang berkompeten pada bidang masing-masing BPR juga memperhatikan kesetaraan gender dalam penerimaan pegawai.

**Jumlah Komposisi SDM PT BPR Go Digital
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Doktor (S3)	0
2	Pasca Sarjana (S2)	1
3	Sarjana (S1)	10
4	Sarjana Muda / Diploma	16
5	SMA Sederajat	6
6	SMP Sederajat	2
7	SD Sederajat	0
Total		35

Jumlah Komposisi SDM PT BPR Go Digital Berdasarkan Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	18
2	Perempuan	17
Total		35

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia

BPR dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan training-training untuk pegawai baik itu secara offline maupun online agar BPR dapat mengikuti perkembangan yang ada saat ini.

3.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

Kondisi keuangan PT BPR WIRANADI sesuai pada tabel di bawah ini:

A. Kinerja Keuangan

(Dalam Juta Rupiah)

No	INDIKATOR	2025 (TW III)	2024	2023
1	Total Aset	76.067	52.373	42.649
2	Modal Inti	5.224	6.552	8.241
3	Kredit Yang Diberikan	59.560	39.250	28.793
4	Dana Pihak Ketiga	16.739	19.129	54.895
5	Pendapatan Operasional	6.830	9.035	11.075
6	Beban Operasional	5.157	7.568	9.645
7	Laba Operasional	1.205	1.602	2.011

B. Rasio Keuangan

No	INDIKATOR	2025 (TW III)	2024	2023
1	Rasio KPMM	36.84%	35.85%	23.83%
2	NPL Gross	9.50%	15.80%	2.77%
3	NPL Net	9.10%	9.29%	9.45%
4	ROA	3.21%	3.18%	3.12%
5	NIM	16.14%	15.56%	15.24%
6	Rasio BOPO	81.07%	80.74%	81.22%
7	LDR	78.95%	77.36%	74.68%

Faktor- faktor yang mendukung penetapan tujuan dan prioritas Keuangan Berkelanjutan. Faktor-faktor yang disebutkan adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dimiliki ataupun sedang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal BPR bersangkutan. BPR menjelaskan keterkaitan faktor-faktor tersebut dengan upaya BPR dalam merencanakan dan menjalankan program Keuangan Berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa:

1. Rencana strategis bisnis yang telah ada;
2. Kapasitas organisasi yang dimiliki sekarang;
3. Kondisi keuangan dan kapasitas teknis yang dimiliki sekarang;
4. Kerjasama dengan pihak eksternal jika ada;
5. Strategi komunikasi yang ada;
6. Sistem monitoring, evaluasi dan mitigasi yang selama ini dijalankan; dan
7. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu Keuangan Berkelanjutan.



Strategi, Sistem, dan Faktor Lainnya

3.4. Strategi Komunikasi

BPR berupaya menciptakan komunikasi yang baik untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan kinerja individu pegawai dan perusahaan secara berkelanjutan. Dalam konteks Keuangan Berkelanjutan, BPR terus mengkomunikasikan agar aktivitas operasional untuk lebih mendukung pelestarian lingkungan melalui berbagai inisiatif di antaranya :

1. Melakukan penghematan energi, air, dan kertas
2. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pegawai tentang perilaku hidup ramah lingkungan.



3.5. Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi

Monitoring dilakukan secara periodik untuk memastikan rencana dilaksanakan dan evaluasi terus berjalan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mekanisme monitoring yang dilakukan antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam rangka monitoring kondisi terkini.
2. Rapat yang dilakukan secara berkala untuk memonitor kinerja seluruh unit kerja.



3.6. Kebijakan Pemerintah, dan Faktor Lainnya

Pelaksanaan RAKB juga mengacu kepada regulasi dan kebijakan pemerintah.

BAB IV.

Prioritas dan Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

4.1. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan/ atau Standar Prosedur Operasional yang mendukung Keuangan Berkelanjutan.

a. Dasar Pemikiran

Pengembangan dan penguatan organisasi perusahaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Keuangan berkelanjutan beserta penerapan dan implementasinya dikarenakan organisasi menjadi landasan utama dalam membangun keuangan berkelanjutan. Pelaksanaan keuangan berkelanjutan dimulai dari setiap tatanan organisasi. Komitmen serta dukungan dari Manajemen merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penentu dari terlaksananya program- program yang telah direncanakan. Dukungan dari setiap organisasi yang bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya agar selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memberikan pertimbangan kepada Direksi di dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut.

b. Rencana Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Periode	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Pelaksanaan literasi keuangan dan akuisisi nasabah penyimpan dan debitur yang memiliki usaha masuk kategori berkelanjutan.	01 Nov 2026 s/d 30 Nov 2026	SDM	Bagian Bisnis

c. Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan di atas membutuhkan dana yang berasal dari dana perusahaan. Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Divisi Penanggung Jawab kegiatan dengan melibatkan setiap unsur dalam struktur organisasinya serta membutuhkan masukan dari regulator, Auditor Eksternal maupun lembaga konsultan/ praktisi dalam implementasinya.

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Proses penilaian akan dilaksanakan dengan merujuk pada parameter dan jadwal yang telah ditetapkan secara komprehensif oleh unit organisasi yang bertanggung jawab.

e. Tantangan dan Rencana Kedepan

Tantangan eksternal antara lain adanya perubahan kebijakan pemerintah, kondisi permintaan agregat masyarakat atas program keuangan berkelanjutan dan lain sebagainya.

BAB V.

Tindak Lanjut dan Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Pegawai, Pejabat dan/atau Unit Kerja yang Bertanggung Jawab terhadap Monitoring dan Evaluasi

1. Pemantauan merupakan aktivitas penting untuk memastikan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan dilaksanakan secara efektif.
2. Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dilakukan di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan dievaluasi pada akhir setiap periode kegiatan.
3. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas dan pencapaian program, serta mengidentifikasi tindakan yang diperlukan jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Peran Direktur Kepatuhan dan kepala divisi terkait dalam hal ini sangat penting.
4. Fungsi Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, sedangkan Manajemen Risiko melakukan pemantauan risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kerangka penerapan manajemen risiko.
5. Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dilakukan di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan dievaluasi pada akhir setiap periode kegiatan.
6. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas dan pencapaian program, serta mengidentifikasi tindakan yang diperlukan jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
7. Direktur Kepatuhan dan Kepala Divisi terkait memantau pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan dari sisi kepatuhan dan aspek hukum, sedangkan Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kerangka penerapan manajemen risiko.

5.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Untuk memastikan efektivitas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diperlukan penentuan jangka waktu secara berkala dengan mempertimbangkan koordinasi antara para pihak, standar yang dibuat dalam pelaksanaannya, serta pemahaman yang sama dalam pelaksanaan, maka waktu pengukuran dan penyampaian realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan antara lain

1. Pemantauan Realisasi Rencana Aksi Keuangan berkelanjutan tahun berjalan
2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

No	Aktivitas	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Pemantauan Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun berjalan	Bulan	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/RAK dan RAKB bekerjasama dengan divisi terkait
2	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Akhir November Tahun Berjalan	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/RKA dan RAKB
3	Laporan Keberlanjutan	Paling lambat akhir April Tahun berjalan	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/RKA dan RAKB bekerjasama dengan divisi terkait

5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat terimplementasi sesuai harapan dan timeline yang direncanakan, maka bank akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan sosialisasi aksi keuangan berkelanjutan pada tahun berjalan.
2. Mengkaji ulang indikator kinerja yang dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya.
3. Melakukan revisi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelemahan pada penyusunan sebelumnya.

5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Mencapai Tujuan yang Diinginkan

Untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan keuangan berkelanjutan, BPR melakukan pemetaan risiko terlebih dahulu atas setiap rencana prioritas sehingga dapat menghasilkan mitigasi risiko.

A. Sosialisasi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal memitigasi risiko atas penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar Prosedur Operasional yang mendukung keuangan berkelanjutan maka diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keuangan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan saat ini dan generasi yang akan datang, sehingga usaha perbankan yang dijalankan bisa tetap bertahan dan semakin berkembang di masa-masa yang akan datang.



B. Pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola Keuangan Berkelanjutan.

- a. Meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk dan/atau jasa dimaksud. Program ini antara lain untuk pegawai yang bekerja di unit manajemen risiko, pengembangan bisnis dan pelayanan konsumen.
- b. Mulai merancang dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas intern sebelum waktu mulai implementasi. Prioritas ditujukan bagi pengurus bank dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan. Untuk selanjutnya, target jangka panjang program peningkatan kapasitas intern ditujukan untuk seluruh pegawai karena keberhasilan implementasi Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh pegawai.
- c. Menyiapkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan program- program Keuangan Berkelanjutan. Penyiapan sumberdaya manusia dapat berupa penyesuaian kriteria dalam proses rekrutmen pegawai baru, pelatihan, proses pengayaan, penyesuaian penilaian kinerja dan sistem remunerasi.

C. Pengembangan dan penyesuaian Produk dana dan Jasa serta layanan perbankan yang mendukung keuangan berkelanjutan.

- a. Mencermati dan mempertahankan pasar yang diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan & pemberdayaan sektor binaan UMKM, pariwisata, dan potensi lainnya. Mencermati situasi ini, maka BPR akan melakukan inovasi layanan untuk memudahkan kebutuhan nasabah salah satunya adalah layanan mobil Kas Keliling yang didesain khusus untuk memenuhi transaksi perbankan nasabah di manapun dan kapanpun.
- b. Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan. Informasi ini memastikan bahwa bank hanya menjual produk dan jasa yang sudah teruji keamanannya melalui penyampaian risiko dan pemilihan mitra bisnis.
- c. BPR memberikan perlindungan dan keamanan produk bagi nasabah dengan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam setiap fitur layanan kepada nasabah. Fitur layanan akan

selalu dikembangkan dengan dukungan sistem teknologi informasi dalam area ketersediaan layanan sistem (system availability), keandalan sistem (system reliability) dan sistem keamanan (cyber security). Penerapan sistem deteksi penipuan (fraud detection system) juga diawasi secara ketat. Diupayakan seluruh produk telah diuji keamanannya, untuk memastikan risiko kerugian yang seminimal mungkin atas produk tersebut, BPR akan selalu memberikan informasi atas semua risiko yang dapat terjadi kepada nasabah sebagai bahan pertimbangan menggunakan produk yang ditawarkan lebih lanjut.

- d. Mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan melalui metode survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, dimana survei merupakan salah satu sarana bagi BPR dalam melakukan komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Hasil survei dan mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negative akan disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan transparansi dan keseimbangan penyampaian informasi, yang tidak hanya pada dampak positif saja.
- e. BPR akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan nasabah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja bank. Selain nasabah, masukan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, masyarakat sekitar, Regulator juga perlu diperhatikan oleh bank.

D. Penyaluran kredit berbasis lingkungan.

- a. Mempertahankan dan meningkatkan portofolio pembiayaan yang berdampak positif bagi aspek lingkungan dan sosial.
- b. Meningkatkan kapasitas perbankan dalam memahami risiko lingkungan serta dampak positif dari kredit yang disalurkan.
- c. Memperkuat kolaborasi dan koordinasi bank dengan sektor industri hijau.
- d. Menentukan batas penyaluran kredit minimal yang berlaku bagi internal bank mengingat meski aturan sudah dibuat, tetapi kewajiban terkait dengan jumlah penyaluran kredit minimal yang harus disalurkan belum ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi beban ekosistem terhadap usaha yang dibiayai bank masih tinggi dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan kelestarian lingkungan kurang kuat.
- e. Memberikan insentif kepada debitur yang berada pada kolektibilitas rendah namun secara efektif telah menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam proses bisnisnya dengan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial atau memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim.

E. Sarana Prasarana

Penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung aspek keberlanjutan dalam aktifitas operasional Bank. Mitigasi risiko diatas dapat dilakukan dengan mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan

polusi/limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon, serta memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang, perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

F. Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang searah dengan program keuangan berkelanjutan.

- a. Menempatkan risiko yang ditimbulkan dari aktifitas CSR dibawah monitoring dan evaluasi seorang Direksi demi menekankan perlunya komitmen berkelanjutan dalam melaksanakan aktifitas CSR.
- b. Mitigasi risiko di bidang CSR dilakukan dengan merancang kegiatan CSR yang dikaitkan dengan risiko yang ditimbulkan kemudian akan dilakukan analisa risiko dengan melibatkan divisi-divisi yang berpotensi terkena risiko.
- c. Menerapkan prinsip bahwa kegiatan CSR yang tepat tanggung-jawab seluruh divisi dan merupakan kegiatan di awal kegiatan bisnis, bukan kegiatan di akhir tahun setelah perusahaan memperoleh profit, sehingga kegiatan CSR yang akan dilaksanakan didasarkan atas perencanaan yang tepat disertai dengan strategi pencapaian yang efektif.

5.5. Penutup

Demikian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan implementasi Keuangan Berkelanjutan.